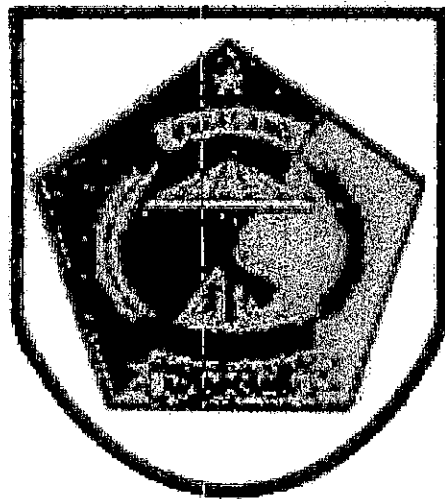


---

**RENCANA KERJA  
TA . 2019**



**DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KB  
KOTA KOTAMOBAGU**

---



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kotamobagu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rencana Kerja Dinas PP dan KB Kotamobagu tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi PP dan KB Kota Kotamobagu seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 yaitu

:

***"KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"***

Berdasarkan Visi Pembangunan Kota Kotamobagu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menitik beratkan pada isu "Menuju Masyarakat Sejahtera".

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mendukung pencapaian isu "Menuju Masyarakat Sejahtera", terdapat pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui pelayanan prima di bidang Keluarga Berencana dengan target menurunkan Angka Kelahiran (TFR), penurunan angka pemenuhan KB yang tidak terlayani (*unmetneed*), peningkatan capaian peserta KB modern (CPR) serta peningkatan kesejahteraan keluarga melalui upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dengan cara pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga melalui kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2019 adalah :



- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
- l) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- m) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga.



Berencana Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam mengoperasikan RKPD Kota Kotamobagu tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Kotamobagu.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu selama tahun 2019.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan dan tugas dan fungsi SKPD serta review terhadap rancangan awal RKPD.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. PENUTUP**

Berisi catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

#### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



**B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

**Evaluasi Program Tahun 2019**

Anggaran Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Belanja Langsung sebesar Rp. 3.26.014.200.- (termasuk perubahan) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.059.436.477,- dengan 6 program dan 21 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.871.830.155,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 89,30 %

Penyerapan anggaran yaitu:

1. Penyediaan jasa surat menyurat yaitu 100% dari total anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- Kegiatan ini berupa belanja materai yang terbagi ke dalam 4 (empat) triwulan , dengan realisasi sebesar Rp.3.600.000.- atau 100 %
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terdiri dari total anggaran sebesar Rp. 30.360.000,-. Kegiatan ini berupa belanja air, belanja listrik dan belanja Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit yang terbagi ke dalam 4 (empat) triwulan yang masing-masing Triwulan I ,II, III, IV . ddengan realisasi sebesar Rp.11.878.335.-
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dari toral anggaran sebesar Rp. 6.000.000.- Kegiatan ini berupa Belanja Pajak Kendaraan Bermotor yang terbagi di Triwulan I. realisasi sebesar rp.5.658.300.-
4. Penyedia jasa Administrasi Keuangan dengan total anggaran sebesar Rp.267.600.000.- yang terbagi empat triw. I,II,III,IV dengan capaian keuangan 81,04 % sebesar rp.216.850.000.-
5. Penyedia ATK kantor Rp. 29.871.750.- terdiri dari tiga Triw. Masing – masing triw dengan jumlah Rp,- Triw. I , terdiri dari Rp. 9.582.250 triw. II Rp. 9.582.250 .- Triw III Rp. 10.707.250.-Realisasi Rp. 29.835.400.- dengan total 99,88 %.
6. Penyedia barang cetakan dan penggandaan Total Rp.13.056.250.- dengan realisasi Rp, 13.053.900.-



7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yaitu 2.591.500.- Kegiatan ini berupa Belanja Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) dan Jaringan / instalasi listrik, Gudang Alokon dan Gedung PPKS Kampung KB ,dengan total realisasi sebesar Rp.2.591.250.- ( 99,99 %).
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yaitu 99,98 % dari total anggaran sebesar Rp.140.610.000,-. Kegiatan ini berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang terbagi ke Triwulan I, II III da IV , dengan total realisasi Rp.140.576.182.-
9. Pengadaan peralatan gedung kantor yaitu 95,82% dari toral anggaran sebesar Rp.3.200.000.- Kegiatan ini berupa Belanja Pengadaan Printer yang dalam perencanaannya direalisasikan pada Triwulan I.Realisasi Rp.2.800.000.-
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yaitu 72,61 % dari toral anggaran sebesar Rp. 48.567.500.- Kegiatan ini berupa Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas yang terbagi ke Triwulan I, II, III,IV dengan total realisasi Rp.48.507.563.-
11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yaitu 92,70 % dari toral anggaran sebesar Rp. 7.500.000.- Kegiatan ini berupa Belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terbagi ke Triwulan III sebesar dengan total realisasi Rp. 7.425.000.-
12. Pelaksanaan Harganas, dengan anggaran sebesar Rp.38.4446.000.- denga realisas dengan anggaran sebesar Rp 38.446.000.- Yang terdiri dsri belanja ATK dan Perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah
13. Penyedia informasi Data Mikro Yaitu anggaran sebesar Rp. 98.185.000.- dengan realisasi sebesar Rp 95.035.000.-
14. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dak Non fisik dengan anggaran sebesar Rp. 1.129.585.000.- dengan realisasi sebesar Rp..... Yang terbagi Dalam 4 Triwulan dengan realisasi sebesar rp.1.019.975.200.- ( 90,30 % )
15. Pelayanan KB Medis operasi
16. Sosialisasi kerjasama faskes dan jejaringnya dengan BPJS dengan anggaran sebesar Rp. 9.597.700.- dilaksanakan pada triwulan 1 dengan Realisasi sebesar Rp 9.597.700.- ( 89,17 % )





17. Pelayanan konseling K Pemasangan konseling KB yaitu 92,26 % dengan total anggaran sebesar Rp.103.906.400.- dengan realisasi sebesar Rp.92.656.400.-
18. Saranan Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera anggaran sebesar Rp.11.239.100.- dengan realisasi sebesar Rp 11.239.100.- Yang telah dilaksanakan pada Triwulan 1.
19. Pengadaan Sarana bagi UPT , PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD DAK 88,74 % dengan anggaran sebesar Rp. 409.668.000.- dengan realisasi sebesar Rp 314.620.000.-
20. Pembangunan Balai Penyuluh KKB tingkat kecamatan dengan realisasi sebesar Rp. 646.800.000.- dengan realisasi sebesar rp. 612.784.825.- ( 94,74 % )
21. Pengadaan Sarana KIE KIT keendudukan KB dan Pembanguna Keluarga (KKBPK) DAK dengan anggaran sebesar Rp. 25.630.000.-realisasi sebesar Rp. 194.700.000.- (89,30 %

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020**

Sedangkan untuk tahun 2020 dengan usulan sebesar Rp. 5.022.050.983.-,- sudah termasuk Belanja tidak Langsung, dan Belanja Langsung terurai dalam 8 program dan 20 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Kotamobagu, pada dasarnya kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu adalah mengacu pada "Pelayanan". Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra PP dan KB Kota Kotamobagu tahun 2019 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi melaksanakan program sub Bagian Umum, dan Kepegawaian melaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
  - c. Menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;



- d) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
  - e) Pengadaan kendaraan dinas / operasional
  - f) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
  - g) Pengadaan meubeleur
4. Strategi Peningkatan Disiplin Aparatur dengan arah kebijakan :
- a) Pengadaan mesin / kartu absesnsi
  - b) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - c) Pengadaan pakaian KORPRI
  - d) Pengadaan pakaian hari hari tertentu



Tabel 1

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA KOTAMOBAGU

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018 (THN N-2)	TAHUN 2019 (THN N-1)	TAHUN 2020 (THN N)	TAHUN 2021 (THN N+1)	TAHUN 2018 (THN N-2)	TAHUN 2019 (THN N-1)	TAHUN 2020 (THN N-1)	TAHUN 2021 (THN N+1)	
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			2,09	1,36	1,31	1,27	2,09	1,36	1,31	1,27	
2	Total Fertility Rate (TFR)			2,38	2,17	2,13	2,10	2,38	2,17	2,13	2,10	
3	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan			7	7	8	8	7	7	8	8	
4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan			18	18	22	26	18	18	22	26	



## Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kotamobagu 2019

	pendidikan kependudukan											
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga			2,17	2,17	2,13	2,10	2,17	2,17	2,13	2,10	
6	Ratio Akseptor KB			78,80	78,80	78,80	79	78,80	78,80	78,80	79	
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49			78,80	78,80	78,80	79	78,80	78,80	78,80	79	
8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per. 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)			44	19	19	19	44	19	19	19	
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun				1,57%	1,57%	1,57%		1,57%	1,57%	1,57%	
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)			44	9,30	9,30	9,30	44	9,30	9,30	9,30	
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			34,65	34,65	35,50	36,50	34,65	34,65	35,50	36,50	







## Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kotamobagu 2019

desa/kelurahan												
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		73%	73%	75%	77%	73%	73%	75%	77%		



***Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi***

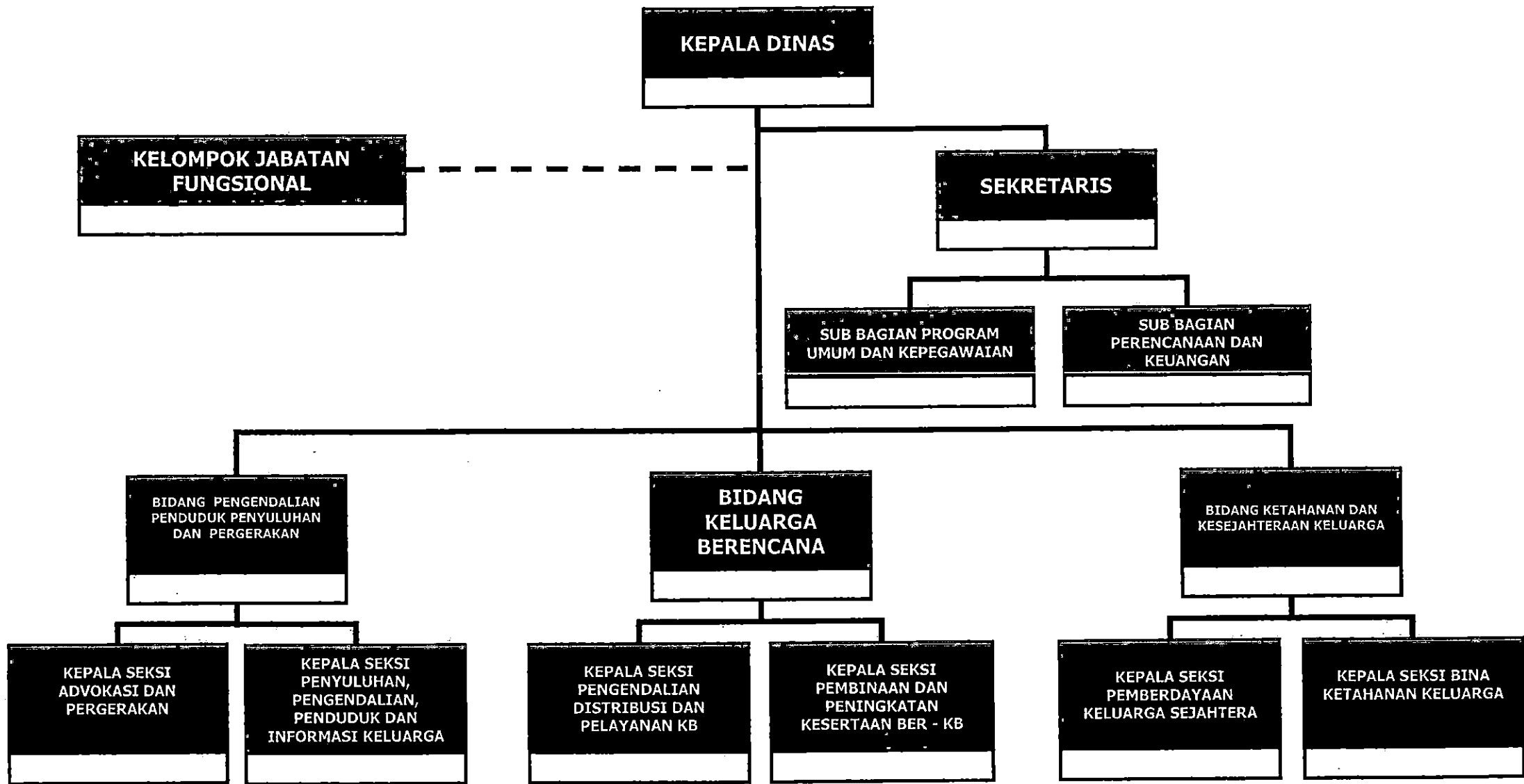
Sampai saat ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

Susunan Organisasi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretaris Membawahi 2 (dua ) Sub Bidang :
  - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan,
  - 1) Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan
  - 2) Kepala Seksi Penyuluhan , Pengendalian, Penduduk dan informasi Keluarga
4. Kepala bidang Keluarga Berencana
  - 1) Kepala Seksi Pengendalian, Distribusi, dan Pelayanan KB
  - 2) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB
5. Kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelaurga Sejahtera
  - 2) Kepala Seksi Bina Ketahanan keluarga
6. Kelompok Jabatan fungsional

Struktur Organisasi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu dapat dilihat pada gambar berikut :





#### **a. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, di tempuh melalui beberapa kebijakan organisasi yang di pandang strategis serta dapat diaplikasikan dalam bentuk program kerja serta kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan administrasi dan inventarisasi yang tertib dan tepat waktu.
2. Peningkatan kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur.
3. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah.
4. Peningkatan kenyamanan gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas.
5. Peningkatan kelancaran tugas pimpinan.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020(Rancangan Awal)  
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	2	3	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 24	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, Pengangguran dan peningkatan Pelayanan Dasar	Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan posyandu	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	73%	86,400,000			75%	

2.02.2.08.01.024.000	??	SKPD	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok BKB Holistik Integratif yang dilatih	75 Orang	50,000,000	-		75 Orang	50,000,000
2.02.2.08.01.024.000	??	SKPD	Terbentuknya BKB Holistik Integratif	7 Kelompok	15,000,000	-		8 Kelompok	15,000,000
2.02.2.08.01.024.000	??	Kotamo bagu Utara, Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur	Terlaksananya lomba bina keluarga balita	1 Kegiatan	15,000,000	-		1 Kegiatan	15,000,000
2.02.2.08.01.024.000	??	SKPD	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi	4 Kali	6,400,000	-		4 Kali	6,400,000

2	2	19	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan modal sosial	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun ; Total Fertlity Rate ( TFR )	1,57 %;2,17 Orang	40,256,000			1,57 %;2,13 Orang	
2.02.2.08.01.019.000					??	SKPD	Kota Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya dibawah 20 Tahun yang mengikuti penyuluhan	30 Orang	40,256,000	-		30 Orang	40,256,000

2	2	20			<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>		<b>Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa</b>	<b>29 Kelompok</b>	<b>546,200,000</b>			<b>42 Kelompok</b>	
2.02.2.08.01.020.000				??	SKPD, Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara	Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling jalur masyarakat yang terbentuk Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling jalur pendidikan yang terbentuk		7 Kelompok9 Sekolah	16,500,000	-		7 Kelompok9 Sekolah	16,500,000

2.02.2.08.01.020.000		??	SKPD	Pengelola PIK-Remaja/M yang mengikuti pelatihan	78 Orang	50,000,000	-		51 Orang	30,000,000
2.02.2.08.01.020.000		??	Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Terlaksananya lomba PIK - R Jalur kemasyarakatan Terlaksananya lomba PIK - R Jalur pendidikan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	32,000,000	-		1 Kegiatan 1 Kegiatan	32,000,000
2.02.2.08.01.020.000		??	SKPD, Kotamobagu Utara, Kotamobagu Barat, Kotamobagu Selatan, Kotamobagu Timur	Jumlah forum GENRE jalur pendidikan yang terbentuk Jumlah forum GENRE jalur masyarakat yang terbentuk	1 Organisasi 1 Organisasi	39,700,000	-		1 Organisasi 1 Organisasi	39,700,000

2.02.2.08.01.020.000				??	Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara, Kotamo bagu Barat	Tersedianya GENRE KIT	12 Paket	408,000,000	-	11 Paket	374,000,000
2	2	21		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	75 Persentasi	40,000,000		70 Persentasi	
2.02.2.08.01.021.000				??	Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara	Jumlah PIK-R yang mengikuti penyuluhan	10 Kelompok	40,000,000	-	10 Kelompok	40,000,000
2	8			Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana							



2	8	27	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, Pengangguran dan peningkatan Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman penggunaan alat kontrasepsi	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta Kelengkapan Sarana Kerja Pembinaan Program KKB dan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Program KKB Tenaga Lini Lapangan	Presentase Sarana dan Prasarana penyuluhan KKB tingkat kecamatan	100 Kecamatan	1,272,098,000			100 Kecamatan	
2.08.2.08.01.027.000					??	Kota	Jumlah sarana BKB KIT	1 Keg	215,630,000	-	0 Keg	0

2.08.2.08.01.027.000		??	Kota	Jumlah balai penyulhan KKB tingkat kecamatan	4 Balai	646,800,000	-		0 Balai	0
2.08.2.08.01.027.000		??	Kota	Tersedianya sarana kerja bagi UPT, PKB/PLKB dan PPKBD serta Sub PPKBD (DAK)	3 Keg	409,668,000	-		0 Keg	0

2	8	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri; Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	42 %;125 %	106,597,400		43 %;125 %		
2.08.2.08.01.018.000				??	Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara	Terbentuknya Pusat pelayanan keluarga Sejahtera	8 Kelompok	12,739,400	-	8 Kelompok	12,739,400

2.08.2.08.01.018.000	??	Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara	Tersedianya Dana Operasional Pengelolah Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	9 Orang	45,200,000	-		9 Orang	45,200,000
2.08.2.08.01.018.000	??	Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara	Terlaksananya Kegiatan Lomba Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	15,000,000	-		1 Kegiatan	15,000,000
2.08.2.08.01.018.000	??	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Orientasi Kelompok UPPKS	1 Kegiatan	33,658,000	-		0 Kegiatanp	0

2	8	17			Program pelayanan kontrasepsi	<p>cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kotamobagu;  Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) ; Ratio Aseptor KB;  Persentase penggunaan kotrasepsi jangka panjang (MKJP);  Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-19; Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi</p>	<p>100 %;9,3 %;78,8 %;34,65 %;78,8 %;25 %</p>	1,171,471,000		<p>100 %;9,3 %;78,8 %;35,5 %;78,8 %;25 %</p>
---	---	----	--	--	-------------------------------	---	---	---------------	--	--

2.08.2.08.01.017.000		??	Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara	Tersedianya Pelayanan KB, Alat dan Obat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	2.000 Orang	72,225,600	-		2.000 Orang	72,225,600
2.08.2.08.01.017.000		??	SKPD, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara, Kotamo bagu Barat	Tersedianya Alat Kesehatan KB	5 Jenis	690,000,000	-		0 Jenis	0
2.08.2.08.01.017.000		??	SKPD	Jumlah Faskes yang ikut Sosialisasi Fasilitas Kerjasama Faskes dan jejaringnya dengan BPJS	18 Faskes	10,347,700	-		0 Faskes	0

2.08.2.08.01.017.000		??	Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara, Kotamo bagu Barat	Terlaksananya Penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi	4 Kegiatan	12,000,000	-		4 Kegiatan	12,000,000
2.08.2.08.01.017.000		??	Kotamo bagu Utara, Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur	Terlaksananya Pelayanan konseling KB dan Pemasangan kontrasespsi KB	2.500 PUS	217,850,000	-		2.750 PUS	217,850,000
2.08.2.08.01.017.000		??	SKPD	Terlaksananya Pertemuan Medis Teknis	1 Kegiatan	11,547,700	-		1 Kegiatan	11,547,700

2.08.2.08.01.017.000		??	Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara, Kotamo bagu Barat	Terlaksananya Lomba Capaian Peserta KB Aktif Tingkat Puskesmas,Dokter/ Bidan Praktek Swasta	4 Kecamatan	45,000,000	-		4 Kecamatan	45,000,000
2.08.2.08.01.017.004		Pelayanan KB medis operasi	Kotamo bagu Barat, Kotamo bagu Selatan, Kotamo bagu Timur, Kotamo bagu Utara	Jumlah Peserta MKJP (MOW/MOP)	25 Orang	112,500,000	-		25 Orang	112,500,000



2	8	15			Program Keluarga Berencana	<p>Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa ; Laju Pertumbuhan Penduduk LPP ; Angka Kelahiran remaja (Perempuan) Usia 15-19 tahun Per 1000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun); rata-rata usia kawin pertama wanita; Jumlah kerjasama Penyelenggara Pendidikan Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan; Peresentasi Perangkat Daerah ( Dinas/ Badan ) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB; Jumlah Kebijakan ( Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah ) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk; Cakupan PKB / PLKB yang di dayagunakan</p>	<p>100 %;1,36 orang;19 %;22,98 %;18 Sekolah;58,1 %;1 1;100 %;7 Sektor;32,06 %</p>	3,112,560,100		<p>100 %;1,31 orang;19 %;22,98 %;22 Sekolah;58,1 %;0 1;100 %;8 Sektor;32,06 %</p>
---	---	----	--	--	----------------------------	---	---	---------------	--	---

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemban misi dan tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan Pimpinan, administrasi kesekretariatan, Pengendalian Penduduk, Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana, Misi tersebut dijabarkan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap mengacu pada Visi Misi Walikota yaitu : **“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJUMASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas PP dan KB yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2019 – 2023. VISI PP dan KB Kota Kotamobagu adalah :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KETAHANAN KELUARGA UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu. Tahun 2019 – 2023 misi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi PP dan KB Kota Kotamobagu tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Adapun tujuan dan sasaran dengan *misi* yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dikaitkan dengan program dan kegiatan diuraikan pada tabel 3 sebagai berikut :

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- n. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran

#### **2. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b. Pengadaan pakaian KORPRI
- c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

#### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 4. Program Keluarga Berencana**
  - a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
  - b. Pelayanan KIE
  - c. Promosi pelayanan khiba
  - d. Pembinaan Keluarga Berencana
- 5. Program Pelayanan Kontrasepsi**
  - A. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
- 6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**
  - A. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
- 7. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Dimasyarakat**
  - A. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
- 8. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**
  - A. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (DAK)
  - B. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (DAU)
- 9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**
  - A. Pelatihan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
- 10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU**
  - A. Pengkajian pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
- 11. Program Peningkatan Daya jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lapangan KB**
  - A. Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang KB (DAK)
  - B. Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang KB (DAU)
- 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)/Advokasi KB**
  - A. Pengadaan sarana KIE/Advokasi KB (DAK)
  - B. Pengadaan sarana KIE/Advokasi KB (DAU)
  - C. Pengadaan sarana mobilitas/mobil unit penerangan (DAK)
  - D. Pengadaan sarana mobilitas/mobil unit penerangan (DAU)
- 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling**
  - A. Pengadaan sarana pelayanan klinik KB (DAK)
  - B. Pengadaan sarana pelayanan klinik KB (DAU)
  - C. Pengadaan sarana mobilitas/ kendaraan pelayanan KB keliling (DAK)

D. Pengadaan sarana mobilitas/ kendaraan pelayanan KB keliling (DAU)

**14. Program Peningkatan Sarana Pendukung Pengelolaan KB**

- A. Pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi (DAK)
- B. Pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi (DAU)
- C. Pembangunan Gudang Alat/Kontrasepsi
- D. Pengadaan sarana kerja bagi PKB/PLKB (DAK)
- E. Pengadaan sarana kerja bagi PKB/PLKB (DAU)
- F. Pembangunan kantor PPLKB/UPT-KB Kecamatan (DAK)
- G. Pembangunan kantor PPLKB/UPT-KB Kecamatan (DAU)

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Disan PP dan KB Kotamobagu adalah **Program Tahunan** Dinas PP dan KB Daerah Kota Kotamobagu yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Dinas PP dan KB Daerah Kota Kotamobagu.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas PP dan KB Kotamobagu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan**



**Mohamad Aliudin SPD**  
Nip 19711027 199702 1 002